



GUBERNUR MALUKU

MATERI WAKIL GUBERNUR MALUKU

PADA

**SOSIALISASI DAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN
SUARA GEREJANI KATOLIK NASIONAL (LP3KN)**

DENGAN JUDUL :

***Peran Serta Pemda dalam rangka Pembinaan LP3K dalam
Pengembangan Aktivitas Kehidupan Beragama***

14 Juni 2017

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU

TAHUN 2017



GUBERNUR MALUKU

Salam Sejahtera dan Syaloommm... bagi kita semua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Saya Hormati :

- Bapak Dirjen Bimas Katolik, Kementerian Agama Republik Indonesia beserta seluruh jajaran yang telah bekerja keras melaksanakan kegiatan Sosialisasi ini,
- Para Pejabat Daerah, Pembimas/Kabid Bimas/Kabid Urusan Agama Katolik, Komisi Liturgi Keuskupan-Keuskupan, Tokoh Masyarakat Katolik
- Para Peserta Sosialisasi, beserta Undangan dan hadirin yang saya hormati,

Sebagai bagian dari anak bangsa Indonesia, yang peduli dengan kepentingan nasional, saya menyambut gembira dan menyatakan apresiasi tinggi atas pelaksanaan sosialisasi ini. Oleh sebab itu, mengawali pemaparan ini, marilah kita syukuri Anugerah dan Limpahan Kasih dari TUHAN YANG MAHA KUASA yang tetap merahmati kita dengan kesehatan dan kemampuan untuk terus bekerja dan berkarya sesuai amanat yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Kasih itu pula yang memungkinkan kita hadir pada acara yang begitu istimewa di hari ini.

Saya katakan istimewa, sebab sosialisasi ini akan menjadi titik awal, sekaligus dasar pijak untuk melakukan "*lompatan besar*" dalam kehidupan beragama, khususnya bagi umat Katolik di Indonesia. Kehidupan beragama tidak dapat dilepas-pisahkan dari identitas bangsa Indonesia. Sebab sejatinya ke-Indonesia-an kita adalah ke-Indonesia-an yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinneka tunggal ika-an. Ke-Indonesia-an yang sangat beragam dalam suku, ras, agama dan budaya, tetapi sekaligus pula mampu

tampil sebagai bangsa yang dapat mengaktualisasikan perbedaan tersebut menjadi kekuatan pendorong untuk semakin maju.

Dalam semangat menggalang kekuatan bersama itulah, terkandung spirit untuk saling dukung dan saling memberdayakan diantara sesama anak bangsa. Kuncinya, ada pada prinsip egaliter atau kesetaraan yang harus diterapkan secara berkeadilan kepada semua elemen bangsa di seantero nusantara ini. Contoh sederhana kami di Maluku, kami sudah punya *Islamic Center*, *Christian Center*, tetapi juga punya *Katolik Center*, yang dibangun secara bersamaan. Kedepan dalam perencanaan akan dibangun juga bagi umat Budha dan Hindu. Itulah kebersamaan kita, itulah kekuatan kita, itulah *unity power* yang terus kami bangun di Maluku.

Bapak/Ibu Undangan dan Hadirin yang saya hormati,

I. PENGANTAR

Era desentralisasi di Indonesia sebagai *mainstream* dari semangat reformasi, telah mengalihkan mekanisme pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik. Penyerahan sebagian besar kewenangan ataupun urusan pemerintahan dari tingkat pusat ke daerah menjadi warna yang paling menonjol dalam spektrum pemerintahan di era sekarang ini.

UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai hasil revisi atas UU No 32 Tahun 2004, telah mengatur Pembagian Urusan Pemerintahan atas 3 Klasifikasi Urusan Pemerintahan, yaitu : urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Urusan absolut berarti urusan-urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi

dan kabupaten/kota. Adapun yang dimaksudkan dengan urusan pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Membahas tentang masalah agama, berarti kita mesti berbicara tentang Urusan Absolut yang terdiri dari 6 urusan, yaitu : *politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter/fiscal nasional dan urusan agama*. Dalam menyelenggarakan urusan absolut ini, implementasinya diatur dalam 2 cara : yaitu pemerintah pusat melaksanakannya sendiri, dan yang kedua, melimpahkan wewenang kepada instansi vertical di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi.

Amanat diatas, memberikan kejelasan bahwa agama adalah salah satu urusan mutlak yang tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Artinya, kewenangan Pemda terbatas, sebab pemerintah yang mengatur segala hal ihwal tentang agama secara sentralistik. Kewenangan sepenuhnya ada di tangan pemerintah, dan bukan pemerintah daerah. Kewenangan absolut tersebut hanya dapat dilimpahkan atau dilaksanakan kepada instansi vertical ataupun posisi gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah. Dengan demikian, apa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, lebih bersifat fasilitasi dan mendukung penuh apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Artinya ketika Gubernur mengurus dan mengatur urusan-urusan yang terkait dengan keagamaan, di situ posisi Gubernur bertindak sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Kepentingan berikutnya, bahwa masyarakat beragama yang diurus itu adalah rakyat dari Sang Gubernur itu sendiri, sehingga menjadi sebuah kewajiban mutlak baginya untuk

memperhatikan sungguh-sungguh kehidupan masyarakat beragama tersebut secara utuh.

Sebab disadari bahwa, baik-buruknya kehidupan beragama seseorang akan berimbas dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Baik-buruknya tata bergereja mereka, pasti mempengaruhi tata pergaulan mereka. Baik-buruknya tata ibadat dan liturgi mereka, secara signifikan pengaruh terhadap perilaku sosial mereka. Itulah yang menjadi focus atau titik perhatian bagi kami di Maluku.

II. PERMASALAHAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG KEAGAMAAN

Dalam implementasinya, kerja dan pengabdian Pemda Provinsi Maluku tetap dan akan selalu bersentuhan dengan masalah-masalah keagamaan. Dalam praktek bermasyarakat di Maluku, urusan agama menjadi primadona dan selalu menjadi sorotan banyak pihak di lapangan. Saya kira inipun terjadi di daerah lain.

Lebih dari pada itu, apa yang semestinya menjadi kewenangan atau tanggung jawab oleh pemerintah pusat, "**terpaksa**" langsung di-*take-over* oleh Pemerintah Daerah, sebab pertimbangan utamanya ialah demi menjamin stabilitas sosial, politik dan keamanan di daerah. Pemerintah daerah lalu menjadi unsur terdepan dalam menjalankan urusan absolut tersebut.

Aturan aplikatif dari UU No 23 Tahun 2014 yang terkait dengan implementasi teknis belum diterbitkan, tetapi yang terjadi selama ini bahwa terdapat kekurangjelasan dalam prakteknya, yang mana Pemerintah Daerah telah menjadi *eksekutor* dari sebuah urusan yang bukan menjadi kewenangan otonominya.

Ibarat sebuah dilema yang sulit ditemukan titik sengketanya, penyelenggaraan urusan agama di daerah, mesti terselesaikan oleh Pemerintah Daerah. Suka atautidak suka, realitasnya terdapat beban tanggung jawab bahwa, masyarakat dimana lokus penyelenggaraan urusan agama itu terjadi, sesungguhnya adalah masyarakatnya pemerintah daerah. Semua itu berimplikasi pada terpakainya alokasi anggaran APBD untuk pelaksanaan urusan agama di daerah.

III. *STANDING POSITION* PEMERINTAH PROVINSI MALUKU DALAM PEMBANGUNAN KEAGAMAAN DI MALUKU.

Capaian pembangunan nasional adalah buah dari kerja keras semua elemen bangsa. Itu sesuatu paradigma berbangsa yang telah selesai didiskusikan. Terlepas dari presentase yang mampu dikontribusikan oleh masing-masing elemen bangsa, paradigma tersebut lalu menjadi sebuah keniscayaan tertinggi. Apalagi jika, persoalan integritas berbangsa menjadi titik sentuh yang sangat krusial.

Di saat yang sama, makna *egaliter* atau kesetaraan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan sebagai buah kerja keras bersama, mestilah diposisikan secara proporsional pula. Prinsip Kami di Maluku, bahwa Setiap elemen bangsa yang ada di bumi Maluku memiliki kesamaan hak dan kewajiban untuk terlibat dalam melaksanakan pembangunan itu sendiri, maupun terlibat dalam menikmati hasil-hasilnya. Pemerintah Provinsi Maluku akan selalu menerapkan prinsip-prinsip egaliter dalam memandang semua agama di Maluku. Sama seperti halnya Tuhan Allah memandang manusia sama dimata-NYA (bandingkan Mazmur 11 : 4; I Samuel 16 :

7), maka sesungguhnya, semua agama haruslah mendapatkan perlakuan yang sama dan setara oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

Agama itu sesungguhnya adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan bagi manusia, sebab dari sana, manusia mendapatkan panduan, bimbingan, pencerahan dan arah jalan menuju kehidupan yang benar dan dibenarkan oleh Sang Khalik Pencipta Alam Semesta. Agama memang bukan sebuah jaminan keselamatan, tetapi sesungguhnya melalui agama, seseorang akan menemukan jalan menuju keselamatan itu sendiri – (bandingkan Injil Yoh 16 : 4).

Historikal perjalanan pemerintahan di Provinsi Maluku telah mencatat bahwa perlakuan pemerintah daerah terhadap agama-agama di Maluku punya makna tersendiri yang sangat special. Saya yakin Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki catatan manis bahwa pelaksanaan MTQ Nasional Tahun 2012 dan PESPARAWI Nasional Tahun 2015 di KOTA AMBON adalah salah satu event Keagamaan Tingkat Nasional TERSUKSES yang pernah di gelar di Indonesia. Dan kemudian kesuksesan itu menjadi standar bagi daerah-daerah lain dalam penyelenggaraan di masa depan.

Itu adalah urusan-urusan keagamaan yang bersifat Non-Fisik yang terus didorong oleh Pemda Maluku.

Bila ditinjau dari aspek fisik, maka kita bisa saksikan bahwa dampak diselenggarakannya event-event nasional tersebut, terjadi penambahan gedung ibadah maupun infrastruktur dan sarana peribadahan lainnya secara signifikan pada semua agama di Maluku, yang ditopang pembangunannya oleh Pemda Maluku maupu oleh Pemerintah Pusat. Perlu diketahui bahwa, Pemda Maluku

setiap tahun anggaran pasti akan menyiapkan dana pembangunan keagamaan tersebut melalui APBD Maluku. Bahkan lebih daripada itu, setiap bantuan pembangunan fisik dari Pemerintah Pusat atau pihak ketiga lainnya, maka dipastikan akan didistribusikan secara proporsional kepada semua agama yang ada, tentu saja melalui Keuskupan Amboina, MUI Maluku, Sinode GPM, Parisada Hindu Dharma Maluku, maupun Perwakilan Umat Budha Indonesia atau WALUBI Maluku. Singkat kata, *Standing Position* Pemerintah Provinsi Maluku dalam menerapkan kebijakan terhadap urusan keagamaan di Maluku sangat jelas yaitu berdasarkan pada prinsip *equality* atau **Keadilan** dan **Kesetaraan**. Selanjutnya, terpulang kepada Pimpinan Umat Beragama masing-masing untuk merespons dan memanfaatkan secara baik dan bertanggung jawab.

IV. PERAN SERTA PEMDA DALAM PEMBINAAN LP3K DALAM PENGEMBANGAN AKTIVITAS KEHIDUPAN BERAGAMA DI MALUKU

Berbicara tentang peran serta PEMDA dalam pembinaan LP3K, bagi kami justru ini sesuatu yang sudah kami jalani bertahun-tahun. Selama ini program-program pembinaan bagi Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ, dan Lembaga Pengembangan PESPARAWI Daerah atau LPPD, maupun Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Amboina (LP3KA) telah jauh berjalan dan berkembang saat ini.

Data 4 tahun terakhir menunjukkan, dalam tahun 2014 s/d 2017 LPTQ Provinsi Maluku mendapat Bantuan Hibah Keagamaan sebesar Rp. 2,5 miliar setahun. Adapun untuk LPPD mendapat bantuan Rp. 2,3 miliar setahun. Sedangkan LP3KA sudah mendapatkan Bantuan Hibah sejak tahun 2011, dan untuk tahun 2014 s/d 2017 mendapat

Bantuan Hibah sebesar Rp. 850 Juta setiap tahun. Jumlah itu akan bertambah jika terdapat event-event besar, baik tingkat provinsi maupun nasional. Contoh : pada tahun 2015, dimana LPPD mendapat Bantuan Hibah sebesar Rp. 50,8 miliar bagi pelaksanaan PESPARAWI Nasional ke-XI Tahun 2015.

Terkait dengan Rencana pelaksanaan PESPARANI Nasional yang baru pertama kali akan diselenggarakan di Indonesia, maka sesungguhnya dalam kaca mata Pemerintah Provinsi Maluku melihat hal tersebut sebagai sebuah event keagamaan yang setara atau disetarakan dengan pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional bagi umat muslim maupun PESPARAWI Tingkat Nasional yang didominasi oleh umat Protestan atautukah Utsawa Dharma Gita Nasional umat Hindu.

Saudara-saudaraku, Ini bukan soal ikut-ikutan, atau soal gagah-gagahan, tetapi ini persoalan bagi pemerintah untuk bagaimana memperlakukan semua agama secara adil dan setara. Ini soal, bagaimana Umat Katolik Indonesia yang sangat potensial itu diberdayakan semaksimal mungkin supaya mampu mengembangkan tata liturgi mereka, mengembangkan kreatifitas beribadah mereka, mengaktualisasikan pemahaman teologi bergereja dalam konteks realitas hidup sehari-hari melalui perlombaan seni budaya. Hasil konkritnya bahwa, tata liturgi dan peribadatan umat beragama semakin berkembang dan menjadi aktual dalam perpaduan seni dan budaya, kehidupan kerohanian mereka semakin bersemangat sebagai pelaku-pelaku ajaran agama yang diyakini-nya.

Itu implikasi nyata yang kami rasakan di daerah. Hal tersebut semakin diperkaya dalam interaksi *sosial-religius* kemasyarakatan, dimana semangat toleransi benar-benar disemaikan ditataran masyarakat

akar rumput. Buktinya terlihat pada perhelatan MTQ, umat Protestan dan Katolik turut berpartisipasi aktif menjamu para tamu. Sebaliknya pada PESPARAWI, maka umat muslim yang mendapat giliran berpartisipasi menerima kehadiran tamu-tamu dari seluruh Indonesia. Disitulah wujud toleransi sejati dalam jalinan persaudaraan dan kerukunan antar umat beragama.

Sebagai bahan banding, perlu saya sampaikan kepada forum Sosialisasi yang mulia ini, bahwa Event-event MTQ, PESPARAWI Utsawa Dharma Gita maupun PESPARANI telah menjadi agenda tetap keagamaan di Maluku. Khusus untuk PESPARANI, data pelaksanaan tingkat provinsi pertama dilaksanakan di Kota Langgur Kabupaten Maluku Tenggara pada bulan Oktober 2008, PESPARANI ke-2 di Kota Saumlaki Tahun 2011, dan PESPARANI ke-3 Provinsi Maluku pada Tahun 2014 lalu di Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru. Semestinya tahun 2017 ini pelaksanaan PESPARANI ke-4 di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, namun dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pembentukan LP3KN maka seluruh kegiatan di pending untuk menyesuaikan tata kelola sesuai peraturan dimaksud. Hal ini berkaitan erat dengan filosofi Pembentukan LP3KN yang cenderung bersifat *bottom-up*. Pertimbangan berikutnya bahwa dalam rangka percepatan persiapan pelaksanaan PESPARANI Tingkat Nasional 2018, maka melalui konsolidasi internal LP3KA sendiri, lalu memutuskan untuk ditiadakan.

Sebagai informasi : dalam pelaksanaan PESPARANI ke-1 di Kota Langgur, Pemda Kabupaten menyiapkan anggaran kurang lebih Rp.6,7 miliar, sedangkan untuk pelaksanaan PESPARANI ke-2 di Saumlaki, Pemda Kabupaten MTB mengalokasikan anggaran untuk

penyelenggaraan sebesar Rp. 8,5 miliar. Pada PESPARAWI ke-3 di DOBO, Pemda Kabupaten Kepulauan Aru mengalokasikan dana khusus untuk penyelenggaraan acara saja sebesar Rp.12 miliar. Hal tersebut belum termasuk biaya-biaya pembangunan infrastruktur dan renovasi gedung gereja maupun sarana peribadahan lainnya, yang terakumulasi sekitar Rp. 30-an miliar.

Undangan dan Hadirin, yang saya hormati

Saya selain Wakil Gubernur Maluku, saya juga adalah Ketua Panitia Penyelenggaraan PESPARAWI Nasional ke-XI Tahun 2015 di Provinsi Maluku, dan perlu diketahui bahwa kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan PESPARAWI Nasional tersebut sebesar Rp.47 miliar, dan seluruh biaya itu ditanggung oleh Pemerintah, dengan rincian Pemda Provinsi Maluku sebesar Rp. 27 miliar, dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama RI sebesar Rp. 20 miliar. Bersamaan dengan itu, Lembaga Pengembangan PESPARAWI Daerah (LPPD) Provinsi Maluku juga mendapat alokasi anggaran Dana Hibah sekitar Rp. 22 miliar bagi keikutsertaan kontingan Provinsi Maluku dalam PESPARAWI Nasional dimaksud.

Artinya apa ? saya mau katakan bahwa Pemerintah sangat berkepentingan dalam proses pembinaan kehidupan beragama dari masyarakatnya. Pemerintah tidak berada pada posisi hitung-hitungan untung-rugi, tetapi demi kehidupan masyarakat yang semakin rukun, menciptakan perdamaian dan toleransi, yang dibangun diatas spiritualitas untuk mengaktualisasikan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Keuntungan lain yang diperoleh daerah dan umat beragama di Maluku bahwa, ada banyak sekali pembangunan infrastruktur dibangun di daerah, seperti pembangunan gedung *Islamic Center*

pada saat MTQ Nasional Tahun 2012, dan pembangunan gedung *Christian Center* dan *Katolik Center* pada perhelatan PESPARAWI Nasional Tahun 2015 lalu. Begitu pula pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan serta infrastruktur lainnya dari Pemerintah Pusat yang menelan anggaran kurang lebih Rp. 200-an miliar rupiah. Itu semua keuntungan ekonomis yang luar biasa bagi daerah.

Point penting saya bahwa, Negara dan Pemerintah sangat berkomitmen untuk memajukan kehidupan beragama tanpa pandang bulu. Semua agama adalah sama. Kembali terpulang bagi masing-masing Pimpinan dan umat beragama itu sendiri untuk menyambut maksud baik pemerintah tersebut, dan demi merajut ke-Indonesia-an kita yang harmonis, demi menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika nan luhur itu.

Akhirnya saya ingin sampaikan, ada Nasehat Bijak berbunyi begini :
“MARI KITA DOAKAN APA YANG KITA KERJAKAN, DAN MARI KITA KERJAKAN APA YANG KITA DOAKAN ”

V. PENUTUP

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga berguna bagi kita semua, dan terutama demi komitmen kita terus bekerja dan berkarya demi Indonesia yang lebih rukun, Indonesia yang lebih damai, Indonesia yang tetap kokoh berdiri diatas Bhinneka Tunggal Ika.

Sekian dan terima kasih.

Salam Sejahtera Bagi kita sekalian.

Syaloom.

WAKIL GUBERNUR MALUKU,

ZETH SAHUBURUA